

# LAPORAN HASIL

## KAJIAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI PADA MASYARAKAT TRANSMIGRASI UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH USAHA DI KABUPATEN KONAWE



**Dr. Julian Witjaksono, SP, M.Si**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE**

**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR**

1. Judul Penelitian : Kajian Penguatan Kelembagaan Petani pada masyarakat Transmigran untuk meningkatkan nilai tambah usaha di Kab. Konawe
2. Penanggung Jawab : Dr. Julian Witjaksono, SP, M.Si
3. Ketua Tim Pelaksana :  
Nama : Dr. Julian Witjaksono, SP, M.Si  
NIP : 197107301999031001  
Pangkat/Golongan : Pembina/Iva
4. Anggota Tim Peneliti : 3 (tiga) orang  
Pembantu Peneliti : 3 (tiga) orang
5. Alamat/Telepon : Rumah :  
Jalan Laheda No. 72 Punggolaka Puuwatu Kendari  
Kantor :  
BPTP Sulawesi Tenggara  
Jalan Prof. Muh. Yamin No. 89 Puuwatu
6. Jangka Waktu : 3 bulan
7. Biaya diusulkan : Rp. 110.160.000  
(Seratus Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Penanggung Jawab  
A.n. Kepala BPTP Sulawesi Tenggara

  
Dr. Julian Witjaksono, SP, M.Si  
NIP. 19710730-199903 1 001

Ketua Tim Peneliti

  
Dr. Julian Witjaksono, SP, M.Si  
NIP. 19710730 199903 1 001

## PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya maka laporan hasil kegiatan penelitian yang berjudul “KAJIAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI PADA MASYARAKAT TRANSMIGRASI UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH USAHA DI KABUPATEN KONAWE” dapat kami selesaikan tepat waktu. Kajian ini merupakan implementasi dari MoU antara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan Sulawesi Tenggara dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe khususnya kerjasama penelitian di bidang inovasi pertanian.

Penelitian ini telah dilaksanakan selama tiga bulan di lokasi kajian di Kecamatan Asinua dengan desa sampel yaitu Desa Lasada, Desa Awua Jaya dan Desa Asinua Jaya. Kajian ini merupakan upaya untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk perbaikan program pertanian khususnya kelembagaan kelompok tani dan upaya untuk mencari solusi dan strategi dalam meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat di lokasi transmigrasi.

Pada kesempatan ini saya sebagai ketua tim peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe atas perhatian dan kerjasamanya dalam mewujudkan kegiatan penelitian ini
2. Kepada anggota tim penelitian khususnya kepada anggota tim peneliti yang telah berkontribusi dan memberikan saran dan perbaikan dalam pembuatan laporan serta pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan

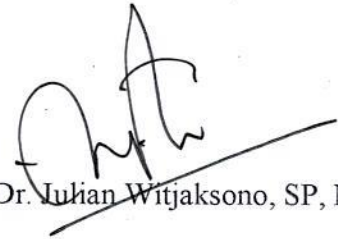
3. Serta kepada seluruh staf Balitbang Kab. Konawe dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang telah banyak membantu demi kelancaran pelaksanaan kegiatan mulai dari seminar awal sampai akhir kegiatan penelitian.

Akhir kata kami sebagai tim peneliti mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian di lapangan, seperti kata peribahasa "tak ada gading yang tak retak", dan kami mohon segala kritik dan saran demi perbaikan pelaksanaan kegiatan penelitian kerjasama ini.

Kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pijakan dan rekomendasi kebijakan bagi penguatan kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Konawe.

Kendari, 2017

Ketua Tim Peneliti,



Dr. Julian Witjaksono, SP, M.Si

## KATA PENGANTAR

Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa saya mengucapkan syukur Alhamdulillah atas selesainya laporan akhir kegiatan penelitian yang berjudul “KAJIAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PETANI PADA MASYARAKAT TRANSMIGRASI UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH USAHA DI KABUPATEN KONAWE” sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana penelitian ini. Kegiatan penelitian ini bersumber dari APBD kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2017.

Penelitian ini didasari atas permasalahan yang selama ini berkembang di wilayah transmigrasi khususnya mengenai lemahnya kelembagaan kelompok tani dalam upaya meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.

Saya atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe serta seluruh staf mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kabupaten Konawe, tim peneliti BPTP Balitbangtan Sulawesi Tenggara sebagai pelaksana kegiatan kerjasama penelitian swakelola yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan seluruh pihak yang membantu demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

Kegiatan penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Konawe khususnya bagi masyarakat petani yang tinggal di wilayah transmigrasi.

Unaaha, 2017

Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kab. Konawe

Drs. Jusmari, M.Si

## DAFTAR ISI

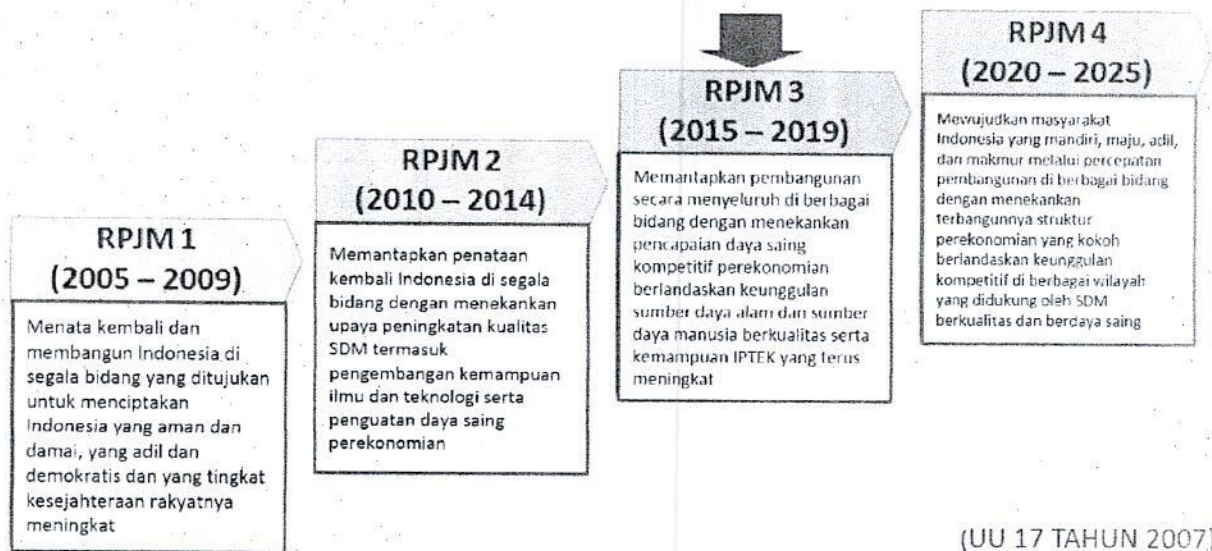
PRAKATA	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	3
	1.3. Keluaran	3
BAB II	STUDI PENDAHULUAN	4
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB IV	METODOLOGI	12
	4.1. Metode Penelitian	12
	4.2. Waktu dan Lokasi	12
	4.3. Tahapan pelaksanaan	13
	4.4. Sumber data	13
	4.5. Instrumen penelitian	14
	4.6. Analisis data	14
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	15
	1.1. Gambaran umum kelembagaan kelompok	15
	1.2. Analisis kelembagaan	18
	1.3. Identifikasi aspek kelembagaan	18
	1.4. Analisis cluster permasalahan	19

1.5. Analisis cluster solusi	20
1.6. Analisis cluster strategi	23
1.7. Analisis prioritas dan strategi model pemberdayaan kelompok	25
BAB VI KESIMPULAN	25
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 (Gambar 1).



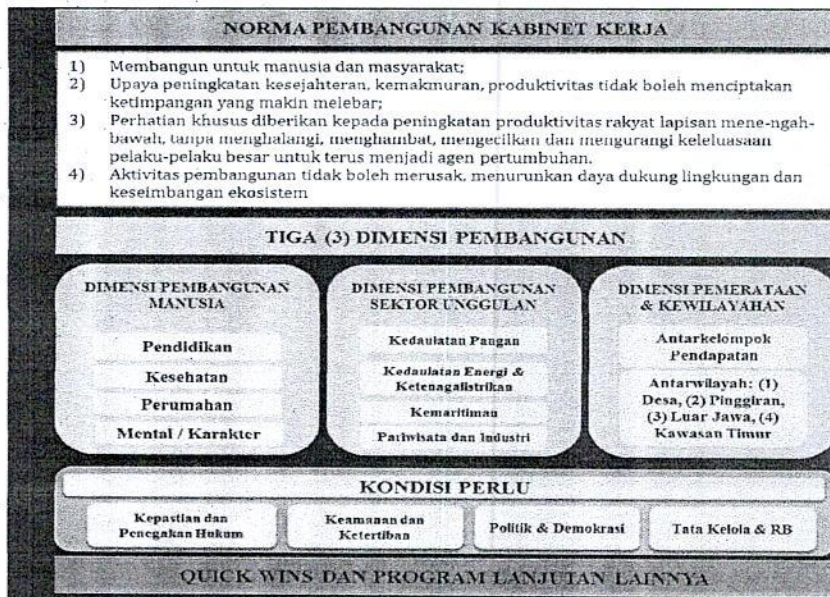
Gambar 1. Tahapan RPJM Nasional

Sesuai dengan tahapan tersebut, pembangunan dalam RPJMN ke-3 (2015-2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan

pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Isu lain yang masih tertinggal dan memerlukan perhatian adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian petani miskin, usaha perikanan tangkap maupun budi daya, dan usaha skala mikro lainnya yang menunjang rantai produksi usaha kecil yang menjadi potensi di wilayah. Perhatian juga perlu ditujukan pada peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif yang seringkali membatasi peningkatan produksi dan skala usaha masyarakat kurang mampu. Ketersediaan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, akses pada kredit jasa keuangan dan sumber permodalan lainnya bagi pelaku ekonomi di pedesaan, serta pemanfaatan riset dan teknologi pertanian, diseminasi dan penyediaan informasi teknologi pertanian juga menjadi faktor penting dalam mendorong ekonomi perdesaan.



Gambar 2. Strategi Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Tahun 2005-2025 memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan diperjuangkan serta diupayakan pencapaiannya, mencakup aspek pembangunan dari segala bidang kehidupan baik sebagai daerah otonom maupun sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM, diantaranya adalah rendahnya akses permodatan kesinambungan pasokan bahan baku, lemahnya posisi tawar sehingga menekan harga jual, kualitas produk rendah, rendahnya akses informasi pasar dan rendahnya daya saing terhadap produk-produk manufaktur. Masih terbatasnya SDM UKM dan belum ada dukungan pembinaan yang optimal. Di era globalisasi pasar bebas dan perdagangan bebas (free trade) disamping menjadi peluang bagi daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi dan SDA, juga bisa menjadi ancaman apabila daerah tidak memiliki kesiapan untuk menghadapinya. Kondisi ini akan terjadi jika produk-produk local tidak berkualitas dan berdaya saing maka akan kalah

bersaing, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional, sehingga akan merugikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian berdasarkan kebijakan NawaCita dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Konawe maka dipandang perlu untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah pusat melalui program NawaCita dan Pemerintah Daerah melalui Rencana Jangka Panjang. Sinergitas tersebut dipandang perlu untuk mengimplemantasikan dan membantu masyarakat khususnya di Kabupaten Konawe. Oleh sebab itu maka kegiatan penelitian dengan judul “kajian penguatan kelembagaan petani pada masyarakat transmigrasi untuk meningkatkan nilai tambah usaha di Kabupaten Konawe” diharapkan menjadi bahan rujukan atau rekomendasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pemerataan pembangunan, peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu diharapkan juga menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan skala usaha khususnya diversifikasi hasil pertanian.

### **1.2. Tujuan**

- a) Mengidentifikasi pola penguatan kelembagaan eksisting petani di wilayah transmigrasi
- b) Merancang bangun pola penguatan kelembagaan kelompok tani di wilayah transmigrasi
- c) Mengembangkan model penguatan kelembagaan kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah

### **1.3. Keluaran**

- a) Teridentifikasinya pola penguatan kelembagaan eksisting petani di wilayah transmigrasi
- b) Rancang bangun pola penguatan kelembagaan kelompok tani di wilayah transmigrasi
- c) Model penguatan kelembagaan kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah

## II. STUDI PENDAHULUAN

Upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Untuk wilayah Kabupaten Konawe, dengan program di bidang pertanian ternyata belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara pendahuluan terhadap beberapa stakeholder yang terlibat dalam program pertanian di Kabupaten Konawe menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan ekonomi terutama di wilayah transmigrasi yang berada di Kecamatan Asinua, selain itu hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih lemahnya kelembagaan kelompok tani terutama dalam upaya meningkatkan nilai tambah usaha. Oleh sebab itu maka penelitian ini diarahkan pada penguatan kelembagaan petani di masyarakat transmigrasi untuk meningkatkan nilai tambah usaha.

Dari hasil observasi awal yang telah dilakukan upaya pengembangan komoditas pertanian di Kabupaten Konawe khususnya di Kecamatan Asinua mengalami masalah yang diduga dapat mempengaruhi perkembangan kelompok tani. Masalah tersebut terkait dengan kelembagaan kelompok tani. Fenomena yang terjadi pada kelembagaan kelompok tani antara lain kurangnya upaya untuk mengadakan penguatan terhadap kelembagaan kelompok tani yang dapat dilihat aspek produksi, pengolahan dan strategi pemasaran yang digunakan, serta belum adanya penataan administrasi/manajemen kelompok tani.

### III. TINJAUAN PUSTAKA

Ditingkat lapangan, terdapat beberapa kelembagaan pertanian perdesaan yang bersifat non formal, salah satunya adalah kelompok tani. Dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 273/Kpts/OT/160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kelompok tani adalah “Kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota”. Beberapa faktor yang menentukan pengembangan kelembagaan kelompok tani, antara lain adalah:

- a) Struktur Organisasi. Struktur kelembagaan kelompok tani tergambar pada Permentan Nomor 237/Kpts/OT/160/4/2007, yang mengisyaratkan bahwa pembentukan kelompok tani disertai dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Disamping itu, kelembagaan kelompok tani mempersyaratkan pula adanya orang (kader) yang menggerakkan kelembagaan kelompok tani tersebut dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.
- b) Kultur Organisasi. Nilai-nilai (*cultur*) budaya yang dimiliki kelompok tani sangat penting guna melestarikan kearifan lokal yang selama puluhan bahkan ratusan tahun berlaku di kelompok tersebut. Menurut Baharsyah dan Tjondronegoro (2007:287), bahwa kearifan lokal mengandung beberapa unsur khas karena ada yang bersumber dari dalam nilai dan norma spritual (agama dan kepercayaan), ada yang terkandung dalam falsafah hidup, dan ada pula yang telah menjadi kebiasaan hidup (*mores*) masyarakat setempat. Menurut

Niode (2002: 109), bahwa di Gorontalo terdapat beberapa nilai budaya yang menjadi bagian dari sistem sosial-ekonomi masyarakat, seperti *huyula* (gotong-royong) dan *dulohupa* (musyawarah mufakat).

- c) Ketatalaksanaan. Sistem yang selama ini telah terbangun antara kelompok tani padi sawah secara kolektif maupun perorangan merupakan bagian dari hubungan ekonomi-sosial yang harus dilaksanakan, seperti sistem bagi hasil antara petani (pemilik) dan penggarap, serta antara pemilik/penggarap dengan pengusaha penggilingan padi. Demikian halnya dengan hubungan kemitraan antara kelompok tani dengan kelompok mitra (pengusaha) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/1997 tentang Pola Kemitraan Usaha Petani. (Mahmud, 2011).

Pada umumnya potensi suatu kelembagaan kelompok tani di dalam pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan karena itulah kelompok tani adalah dasar utama didalam pembangunan pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2006 akhir, jumlah kelompok tani mencapai sebesar 293.568 kelompok tani (syahyutti, 2007). kelembagaan kelompok tani ini sangat penting untuk sarana kegiatan belajar, bekerja sama, dan pengumpulan modal didalam mengembangkan usahatani, jika pemberdayaan kelompok tani ini dilakukan dengan baik. Pentingnya suatu pemberdayaan kelompok tani ini sangat beralasan dikarenakan perhatian pemerintah saat ini sudah kurang semenjak otonomi daerah, dimana ada suatu kecenderungan perhatian pemerintah daerah yang sangat kurang terhadap kelembagaan kelompok tani, bahkan terkesan terabaikan sehingga kelembagaan kelompok tani ini yang sebenarnya adalah aset yang sangat berharga dalam suatu pembangunan pertanian menjadi tidak berfungsi secara optimal.

Apalagi saat ini masih banyak kelompok petani yang lupa modal dasar dalam suatu kelompok tani yaitu kekompakan dan tekad untuk mencapai suatu tujuan. Hal inilah yang membuat suatu kelompok pertanian berjalan. Jika tanpa tekad dan kekompakan maka yang terjadi adalah suatu kelompok yang berjalan tidak tahu arah dan tujuan. Saat ini kebanyakan kelompok tani lebih mementingkan mencari modal yang banyak, baik dengan iuran maupun dari dana pemerintah. Namun jika tanpa tekad dan kekompakan yang terjadi adalah kelompok tersebut hanyalah sebuah nama tanpa ada arti didalam kelompok tersebut yang membuat kelompok tersebut tidak akan aktif lagi. Oleh sebab itu, kekuatan utama didalam suatu kelompok bukan suatu modal tetapi suatu tekad dan kekompakan agar kelompok tersebut bisa menjadi lebih maju.

#### **IV. METODOLOGI PENELITIAN**

##### **4.1. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan metode telaah pustaka, analisis data sekunder dari berbagai sumber informasi yang terpercaya, serta observasi langsung yang menjadi penilaian secara obyektif serta data primer melalui kuisioner dalam pengumpulan data

##### **4.2 Waktu dan Lokasi Kajian**

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kab. Konawe khususnya di desa transmigrasi pada bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2017. Kajian ini berlokasi di Kecamatan Asinua di Kabupaten Konawe. Observasi dilakukan terhadap 3 desa yaitu Desa Lasada, Desa Awua Jaya dan Desa Asinua Jaya. Penentuan daerah sampel kajian ditentukan secara *Purposive Sampling*

(secara sengaja). Karena dengan pertimbangan Desa tersebut merupakan desa yang paling banyak jumlah masyarakat yang bermata pencaharian pokok sebagai petani dengan luas lahan sawah sebagai masyarakat transmigrasi.

#### **4.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

##### **Penyusunan dan Seminar Proposal**

Penyusunan draft proposal dilakukan dalam bentuk tim. Draft yang telah disusun selanjutnya diseminarkan di tingkat Balitbang Kab. Konawe Sulawesi Tenggara. Seminar proposal ini dilaksanakan untuk memperoleh masukan dari para pembahas sehingga proposal yang disusun bisa dilaksanakan secara operasional bagi para pelaksananya di tingkat lapangan.

##### **Penyusunan Kuisisioner**

Kuisisioner disusun berdasarkan hasil diskusi bersama tim untuk menentukan parameter atau variabel yang akan dikumpulkan selama pelaksanaan kegiatan. Kuisisioner ini akan digunakan untuk mengumpulkan data para responden.

##### **Survey dan Wawancara Pengumpulan data**

Tahap selanjutnya adalah survey dan observasi serta wawancara terhadap setiap stakeholder yang terkait berdasarkan peran yang dimainkan. Survey akan dilaksanakan di 3 Desa di Kecamatan Asinua. Namun secara khusus Desa Asinua akan menjadi topik kajian dan permasalahan sebagai desa transmigrasi.

#### **4.4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu data yang berasal dari hasil wawancara dengan informan penelitian, yang terdiri dari:

2. Dinas Pertanian dan Perkebunan yang terdiri dari aparat dan petugas teknis/penyuluh.
  3. Ketua Gapoktan dan kelompok tani Desa Lasada, Desa Awua Jaya dan Desa Asinua Jaya.
  4. Kepala desa sebagai lokasi pengembangan perkebunan Kakao.
  5. pedagang pengumpul.
  6. Masyarakat petani sebagai anggota kelompok tani
- b. Sumber data sekunder yaitu semua data dan dokumentasi dari lokasi penelitian yang relevan dengan fokus penelitian

#### **4.5. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah tim peneliti sendiri. Dalam hal ini perencanaan, pengambilan data, analisis dan penafsiran data, dan penulisan laporan hasil penelitian ditangani oleh tim peneliti sendiri. Untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut, digunakan alat bantu seperti alat perekam suara (*tape recorder*), perekam peristiwa (*camera*), alat tulis, dan pedoman observasi/wawancara. Untuk itu dikembangkan format instrumen penelitian yang dijadikan pedoman wawancara yang didasarkan atas fokus penelitian. Pengembangan instrumen penelitian bertujuan untuk memudahkan dan mengarahkan pertanyaan pada saat wawancara penelitian.

#### **4.6. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik sederhana dan penjelasan secara deskriptif. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data:

- a) Mereduksi data untuk kepentingan penyederhanaan data dalam rangka lebih mempertajam data yang dibutuhkan.

- b) Menyajikan data secara terorganisir dan sistematis, sehingga membentuk satu komponen yang utuh dan terpadu.
- c) Melakukan interpretasi data sebagai langkah penentuan dalam penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti dari data yang tercatat dan disajikan.

## **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **5.1. Gambaran Umum Kelembagaan Kelompok Tani**

Sektor pertanian masih merupakan tumpuan harapan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigrasi di Kecamatan Asinua khususnya di Desa Asinua Jaya. Selain potensi lahan yang subur, potensi lain dari kawasan KEM adalah banyaknya ternak sapi yang dimiliki oleh warga sekitar. Namun ternak sapi ini sebagian besar dibiarkan liar dan tidak dikandangkan secara intensif. Sehingga potensi ternak sapi yang cukup besar tersebut tidak dapat memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat di daerah sekitar. Berdasarkan potensi kondisi lahan yang subur Asinua Jaya dapat didorong untuk menjadi kawasan hortikultura, khususnya sebagai sentra penghasil sayuran di Kabupaten Konawe.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan peneliti, ternyata kelompok tani yang kurang aktif dalam melaksanakan kegiatan kelompok taninya disebabkan karena ketidakmampuan pengurus dalam menggerakkan kegiatan kelompok tani. Disamping itu, sebagian besar anggota kelompok tani kurang memiliki minat terhadap pengembangan komoditas. Dampak dari kelembagaan petani yang lemah dan belum optimal adalah rendahnya posisi tawar petani dalam tata niaga produk pertanian. Ini terlihat dari rendahnya harga yang diterima petani atas produk yang dihasilkan, walaupun harga produk

pertanian yang dibayar konsumen di waktu yang bersamaan cukup tinggi. Padahal resiko akan kegagalan panen yang dihadapi petani juga tinggi. Hal ini disebabkan oleh dominannya peran pedagang besar dan tengkulak dalam menentukan harga melalui kekuatan modal yang dimiliki. Struktur pembagian margin pemasaran yang tidak merata dan tidak sesuai dengan resiko usaha tersebut menunjukkan lemahnya posisi tawar petani terhadap pelaku tata niaga selanjutnya. Sekaligus hal ini juga mengindikasikan adanya kecenderungan praktek oligopsoni dan system tata niaga yang belum efisien. Realitas yang ada, ternyata keberadaan kelompok tani yang kurang aktif ini dibentuk hanya karena ada bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah. Setelah bantuan dibagikan maka kelompok tanipun tidak aktif lagi, sehingga bantuan yang diterima oleh anggota biasanya langsung dijual dipasar dan tidak digunakan untuk menunjang upaya pengembangan komoditas miliknya. Anggota dan pengurus kelompok pada saat pembentukan kelompok tani dalam posisi yang tidak siap untuk melaksanakan kegiatan kelompok tani.

Tiga komponen utama yang mendukung tata niaga pertanian adalah produsen, pedagang, dan konsumen. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa petani sebagai produsen tidak didukung oleh paket teknologi dan lembaga penyedia sarana produksi yang mampu menyediakan secara lima tepat (tepat waktu, jenis, ukuran, tempat, dan harga). Anjuran paket teknologi pertanian sesungguhnya telah disadari manfaatnya oleh petani, yaitu untuk meningkatkan produksi, namun belum sepenuhnya diterapkan karena terbentur masalah pendanaan. Konsekuensinya, produksi belum optimal, baik jumlah maupun mutu, sehingga akan mempersulit pemasaran hasil, terutama untuk tujuan ekspor. Hal lain yang dihadapi petani dalam pemasaran produksi adalah belum dapat menjual langsung kepada pedagang besar atau pedagang lainnya di kota provinsi. Petani umumnya menjual hasil pertaniannya hanya ke pedagang pengumpul atau ke pasar (pedagang

menonjol, (4) pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis *social capital* setempat dengan prinsip keotonomian dan pemberdayaan, (5) pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (*blue print approach*) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan, (6) pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang *top down*, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat, (7) kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal, dan (8) pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya.

## **5.2. Analisis Kelembagaan**

### **5.2.1 Identifikasi Aspek Kelembagaan**

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian di lokasi kajian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembangunan pertanian di lokasi kajian maka perlu adanya pembangunan kelembagaan petani yang dilandasi pemikiran bahwa: (a) Proses pertanian memerlukan sumberdaya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya; (b) Pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumberdaya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi; (c) Kegiatan pertanian mencakup tiga rangka penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga; (d) Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan

kelembagaan dari pusat hingga lokal; dan (e) Kompleksitas pertanian, yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan, sulit mencapai kondisi optimal.

Ada beberapa permasalahan dalam pemberdayaan kelompok tani dalam menciptakan tata niaga dan kelembagaan yang menguntungkan petani di Kecamatan Asinua, antara lain dikelompokkan menjadi 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek tata niaga, aspek teknologi, aspek infrastruktur dan aspek kemitraan.

- a) **Aspek Kelembagaan:** Aspek yang berkaitan dengan organisasi, peran dan fungsinya, norma yang ada di dalamnya, serta kontribusi dari petani terhadap kelompok tani
- b) **Aspek Tata Niaga:** Aspek yang berkaitan dengan semua proses dalam produksi yang meliputi input, produksi, output dan distribusinya
- c) **Aspek Teknologi:** Aspek yang terkait dengan jenis teknologi yang digunakan dan yang dibutuhkan oleh kelompok tani
- d) **Aspek Infrastruktur:** Aspek yang berkaitan dengan jenis dan jumlah sarana serta prasarana yang dibutuhkan oleh kelompok tani
- e) **Aspek Kemitraan:** Aspek yang berkaitan dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait (Stakeholders) dengan kelompok Tani

Aspek-aspek yang telah teridentifikasi, kemudian dibagi dalam *cluster-cluster* yaitu *cluster* permasalahan, solusi dan strategi. Masing-masing *cluster* terdiri dari *sub-sub cluster* yang kemudian dibandingkan untuk memperoleh prioritas dari masing-masing *cluster* maupun *sub-cluster*.

## 5.2.2 Analisis Cluster Permasalahan

1) **Cluster Permasalahan kelembagaan** *Cluster* ini terbagi menjadi 4 *sub-cluster* yaitu *sub-cluster* organisasi; fungsi dan peran; norma; serta inovasi dan kontribusi.

- a) **Organisasi:** Kurang optimalnya kinerja dari pengurus dan anggota organisasi kelompok tani yang akan berpengaruh pada kondisi dari kelompok tani serta segala macam kegiatan yang dilakukan oleh petani.
- b) **Fungsi dan Peran:** Fungsi dan peran organisasi yang masih kurang bagi anggota kelompok tani yang dirasa masih kurang optimal bagi para anggotanya atau petani.
- c) **Norma:** Penerapan norma tertulis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan AD/ART dan memiliki kecenderungan melanggar dari apa yang menjadi kesepakatan bersama dari para petani.
- d) **Inovasi dan Kontribusi:** kurangnya inovasi dan kontribusi/masukan yang membangun bagi penerap dini (kesadaran, minat, menilai, mencoba dan menerapkan). Inovasi dan kontribusi dari para petani dalam membangun pertanian masih kurang dan cenderung menerima anjuran dari pemerintah atau sesuai dengan tradisi yang sudah ada.

2) *Cluster Permasalahan tata niaga Cluster* ini terbagi menjadi 3 *sub-cluster* yaitu *sub-cluster* input, produksi dan pasca panen.

- a) **Input:** Masalah permodal kelompok tani yang kecil sehingga tidak memenuhi sarana dan prasarana produksi.
- b) **Produksi:** Masalah pengadaan pupuk bersubsidi dan obat pembasmi hama (harga, sortasi, *grading* dan *brand*).
- c) **Pascapanen:** Tidak ada perlakuan untuk produk yang dihasilkan (hanya mempertahankan mutu dan perkembangan hasil) dan daerah distribusi yang masih terbatas.

3) **Cluster permasalahan Teknologi** Cluster ini terbagi menjadi 3 *sub-cluster* yaitu *sub-cluster* standar mutu, jenis teknologi serta kegunaan dan kebutuhan teknologi.

- a) **Standar Mutu:** Sapta usaha produksi yang digunakan kurang optimal dalam penerapan teknologi
- b) **Jenis Teknologi:** Jenis teknologi yang digunakan terbatas dan jumlahnya tidak banyak masih tahap adopsi dan sadar teknologi)
- c) **Kegunaan dan Kebutuhan:** Ketidaksesuaian teknologi yang diberikan melalui bantuan dengan yang dibutuhkan oleh petani

4) **Cluster permasalahan infrastruktur** Cluster ini terbagi menjadi 3 *sub-cluster* yaitu *sub-cluster* kondisi sarana prasarana, kuantitas dan kebutuhan.

- a) **Kondisi Sarana Prasarana:** Masih banyak sarana dan prasarana yang rusak serta tidak layak.
- b) **Kuantitas:** Jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai guna memperlancar usaha tani.
- c) **Kebutuhan:** Masih banyak kebutuhan sarana dan prasaran yang dibutuhkan oleh petani.

#### 5) **Cluster Permasalahan Kemitraan**

Cluster ini terbagi menjadi 3 *sub-cluster* yaitu *sub-cluster* sistem kemitraan, koordinasi *stakeholders*, dan jenis kemitraan.

- a) **Sistem Kemitraan:** Sistem kemitraan yang sering tidak menguntungkan pihak petani karena tidak ada MoU (perjanjian tertulisnya).

- b) **Koordinasi Stakeholders:** Koordinasi dilapangan yang masih kurang karena jarang ada pemantauan dari pihak yang terkait dengan petani atau kelompok tani.
- c) **Jenis Kemitraan:** Jenis kemitraan yang masih terbatas jumlahnya.

### 5.2.3. Analisis Cluster Solusi

Adapun alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam penguatan kelembagaan kelompok tani di lokasi kajian yaitu antara lain:

#### 1) Solusi Kelembagaan

- a) Optimalisasi Kinerja Organisasi Kelompok Tani dengan pertemuan rutin kelompok.
- b) Optimalisasi Fungsi dan Peran Kelompok Tani sesuai AD/ART.
- c) Memperjelas dan menerapkan norma yang nberlaku di Kelompok Tani.
- d) Memperbanyak inovasi dan Kontribusi Petani terhadap Kelompok Tani.

#### 2) Solusi Tata Niaga

- a) Manajemen pengadaan input agar tepat waktu dan tersedia sebelum masa tanam mulai.
- b) Optimalisasi hasil produksi melalui pemberian pupuk bersubsidi dan obat pembasmi hama. Perlakuan terhadap hasil produksi untuk memberikan nilai tambah dan strategi pemasaran sesuai dengan keinginan konsumen.

#### 3) Solusi Teknologi

- a) Meningkatkan teknologi yang digunakan guna meningkatkan mutu produk yang dihasilkan.
- b) Menambah jumlah dan jenis sarana serta prasarana seperti traktor dan mesin perontok padi (menerapkan teknologi sesuai anjuran/ sapta usaha tani).
- c) Optimalisasi teknologi sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan petani.

#### 4) Solusi Infrastruktur

- a) Perbaiki sarana dan prasarana yang rusak dan kurang layak.
- b) Penambahan jumlah dan jenis sarana dan prasarana.
- c) Pengadaan infrastruktur yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani.

#### 5) Solusi Kemitraan

- a) Perbaiki dan merubah sistem kemitraan yang kurang menguntungkan bagi kelompok tani dengan membuat MoU (perjanjian tertulis).
- b) Meningkatkan kerjasama antar *Stakeholders* yang terkait dengan petani.
- c) Memantapkan kemitraan yang ada yang meliputi seperti pasar, teknologi dan modal.

#### 5.2.4. Analisis Cluster Strategi

Identifikasi masalah dan solusi yang dilakukan dalam studi ini menghasilkan strategi dalam penguatan kelembagaan kelompok tani yaitu:

- 1) Optimalisasi fungsi dan peran organisasi melalui inovasi dan kontribusi petani terhadap kelompok tani
- 2) Manajemen dan Optimalisasi proses produksi agribisnis dari hulu sampai hilir serta pengelolaan/manajemen usaha tani yang lebih profesional
- 3) Penerapan teknologi yang tepat guna sebagai langkah untuk menambah nilai tambah produk yang dihasilkan
- 4) Manajemen infrastruktur melalui perbaikan dan penambahan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh petani
- 5) Meningkatkan Koordinasi dengan *Stakeholders* yang terkait dengan petani dan menjalin hubungan baik dengan mitra petani

### 5.2.5. Analisis Prioritas dan Strategi Model Pemberdayaan Kelompok Tani

Berdasarkan Wawancara dan pengisian kuesioner menghasilkan beberapa temuan yaitu prioritas permasalahan, prioritas solusi dan prioritas strategi. Penjelasan lebih rinci dari temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) **Prioritas Aspek.** Aspek dalam penguatan kelembagaan kelompok tani terdiri dari 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, tata niaga, teknologi, infrastruktur dan kemitraan. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh aspek yang menjadi prioritas yaitu aspek kelembagaan.
- 2) **Prioritas Masalah.** Permasalahan dalam penguatan kelembagaan kelompok tani terbagi berdasarkan aspek yang telah diidentifikasi yaitu permasalahan kelembagaan, tata niaga, teknologi, infrastruktur, dan kemitraan. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh permasalahan yang menjadi prioritas berdasarkan masing-masing aspek.
  - a) **Permasalahan aspek kelembagaan.** Permasalahan aspek ini terdiri dari 4 permasalahan yaitu organisasi yang kurang optimal, fungsi dan peran yang kurang dirasakan petani, norma yang tidak sesuai dengan AD/ ART serta kurangnya inovasi dan kontribusi dari dan bagi petani. Berdasarkan analisis prioritas permasalahan aspek kelembagaan adalah norma yang tidak sesuai dengan AD/ART
  - b) **Permasalahan aspek tata niaga.** Ada 3 permasalahan dalam aspek tata niaga ini antara lain yaitu modal petani yang kecil sehingga tidak memenuhi input yang dibutuhkan, masalah pengadaan pupuk dan obat hama dalam proses produksi pertanian, tidak ada perlakuan menambah nilai produk yang dihasilkan pascapanen.

Berdasarkan hasil analisis, yang menjadi prioritas permasalahan tata niaga adalah masalah pengadaan pupuk dan obat hama dalam proses produksi.

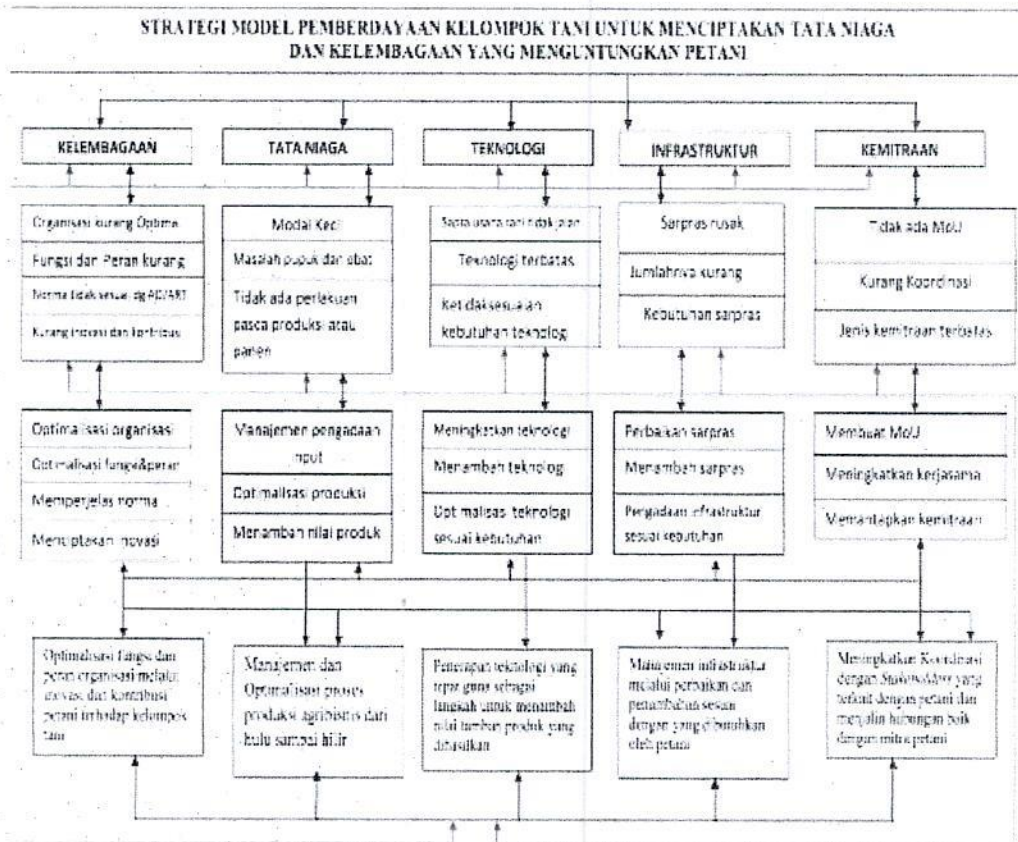
- c) **Permasalahan aspek teknologi.** Permasalahan dalam teknologi antara lain meliputi kurang optimalnya dalam penerapan teknologi, jenis dan jumlahnya terbatas, serta ketidaksesuaian teknologi. Berdasarkan hasil analisis, permasalahan teknologi yang menjadi prioritas yaitu kurang optimalnya dalam penerapan teknologi (standar mutu), khususnya dalam sapta usaha tani.
- d) **Permasalahan aspek infrastruktur.** Aspek infrastruktur mempunyai beberapa masalah yaitu masalah sarpras yang rusak, jumlah sarpras yang masih kurang, dan kebutuhan sarpras yang masih banyak. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh prioritas masalah infrastruktur yaitu jumlah sarpras yang masih kurang dalam mendukung kegiatan atau usaha pertanian.
- e) **Permasalahan aspek kemitraan.** Ada tiga permasalahan yang terjadi dalam aspek kemitraan, antara lain yaitu tidak adanya MoU, koordinasi *stakeholders* yang lemah, jenis kemitraan yang masih terbatas. Berdasarkan hasil analisis, prioritas permasalahan kemitraan yaitu koordinasi antar *stakeholders* yang masih lemah dan kurang intensitasnya.

### 3) Prioritas Solusi

- a) **Prioritas solusi kelembagaan.** Solusi aspek kelembagaan antara lain yaitu optimalisasi organisasi, optimalisasi peran dan fungsi peran, memperjelas norma, serta memperbanyak inovasi dan kontribusi. Berdasarkan hasil analisis, prioritas solusi aspek kelembagaan yaitu optimalisasi fungsi dan peran sesuai AD/ART.

- b) **Prioritas solusi tata niaga.** Solusi dalam aspek tata niaga antara lain meliputi manajemen input, optimalisasi produksi dan perlakuan hasil produksi serta pemasaran pascapanen sesuai konsumen. Hasil analisis menunjukkan manajemen pengadaan input menjadi solusi tata niaga yang diprioritaskan.
- c) **Prioritas solusi teknologi** Solusi dalam aspek teknologi antara lain yaitu meningkatkan teknologi, menambah jenis dan jumlah, serta optimalisasi teknologi. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh hasil prioritas dari solusi teknologi adalah meningkatkan teknologi guna meningkatkan mutu produk yang akan dihasilkan oleh petani.
- d) **Prioritas solusi infrastruktur.** Solusi dalam aspek infrastruktur terdiri dari perbaikan sarpras, penambahan sarpras dan pengadaan infrastruktur sesuai kebutuhan petani. Berdasarkan hasil analisis, maka prioritas solusi aspek infrastruktur yaitu perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan tidak layak.
- e) **Prioritas solusi kemitraan.** Solusi dalam aspek kemitraan yaitu antara lain meliputi membuat MoU, meningkatkan kerjasama, dan memantapkan kemitraan yang sudah ada. Berdasarkan hasil analisis, maka yang menjadi solusi kemitraan yang diprioritaskan yaitu memantapkan kemitraan yang sudah ada yang meliputi pasar, teknologi dan permodalan.
- f) **Prioritas Strategi** Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis pada permasalahan serta solusi masing-masing aspek dalam penguatan kelembagaan kelompok tani di lokasi kajian, maka diperoleh beberapa alternatif strategi yang ditawarkan yaitu meliputi optimalisasi fungsi dan peran organisasi, manajemen dan optimalisasi proses agribisnis, penerapan teknologi yang tepat guna, manajemen infrastruktur melalui perbaikan dan penambahan, serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders*. Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh prioritas alternative strategi yang digunakan untuk memecahkan

permasalahan yang ada yaitu penerapan teknologi yang tepat guna sebagai langkah untuk menambah nilai tambah produk yang dihasilkan oleh petani.



Gambar 3. Model Pemberdayaan Kelembagaan Petani di Lokasi Kajian

## VI. KESIMPULAN

Studi ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut: (1) Aspek yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan kelompok tani di lokasi kajian yaitu aspek kelembagaan. (2) Prioritas permasalahan dalam penguatan kelembagaan kelompok tani dibagi berdasarkan aspek. Permasalahan aspek kelembagaan yaitu norma yang tidak sesuai dengan AD/ART.

Permasalahan aspek tata niaga adalah masalah pengadaan pupuk dan obat hama. Permasalahan aspek teknologi yaitu kurang optimalnya dalam penerapan teknologi dalam sapa usaha tani. Permasalahan aspek infrastruktur yaitu jumlah sarpras yang masih kurang dalam mendukung kegiatan atau usaha pertanian. Permasalahan aspek kemitraan yaitu koordinasi antar *stakeholders* yang masih lemah dan kurang intensitasnya. (3) Prioritas solusi dalam penguatan kelembagaan kelompok tani juga dibagi berdasarkan aspek. Prioritas solusi kelembagaan yaitu optimalisasi fungsi dan peran sesuai AD/ART. Prioritas solusi tata niaga yaitu manajemen pengadaan input. Prioritas solusi teknologi yaitu meningkatkan teknologi guna meningkatkan mutu produk yang akan dihasilkan oleh petani. Prioritas solusi infrastruktur yaitu perbaikan sarana dan prasarana yang rusak dan tidak layak. Prioritas solusi kemitraan yaitu memantapkan kemitraan yang sudah ada yang meliputi pasar, teknologi dan permodalan. (4) Strategi yang menjadi prioritas dalam penguatan kelembagaan kelompok tani yaitu penerapan teknologi yang tepat guna sebagai langkah untuk menambah nilai tambah produk yang dihasilkan oleh petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, Sapja. 2008. Tipe petani dan strategi pengembangan kelembagaan kelompok petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal M'POWER*, No. 8 Vol.8, Oktober 2008.
- Anantanyu, Sapja. 2011. Kelembagaan petani: peran dan strategi pengembangan kapasitasnya. *Jurnal SEPA*, Vol. 7 No. 2 Februari 2011: 102-109.
- Hermanto dan Dewa K.S.S. 2011. Penguatan kelompok tani: langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol 9 No. 4, Desember 2011: 371-290.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk rakyat: memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta. Cides.
- Nasrul, Wedi. 2012. Pengembangan Kelembagaan Pertanian untuk Peningkatan Kapasitas Petani terhadap Pembangunan Pertanian. *Jurnal Menara Ilmu* Vol. III No.29, Juni 2012.
- Suradisastra, Kedi. 2008. Strategi pemberdayaan kelembagaan petani. *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 26 No. 2 Desember 2008. Wahyuni, Sri. 2003. Kinerja kelompok tani dalam sistem usaha tani padi dan metode pemberdayaannya. *Jurnal Litbang Pertanian*, 22 (1), 2003.

## LAMPIRAN



Gambar 1. Pertanaman sayuran paria di Desa Awua Jaya Kec. Asinua Jaya



Gambar 2. Areal usaha tanaman buah naga oleh kelompok tani kemitraan di Desa Asinua Jaya Kec. Asinua



Gambar 3. Tanaman buah naga yang mulai berbuah memasuki tahun ke 3 di jual murah oleh petani



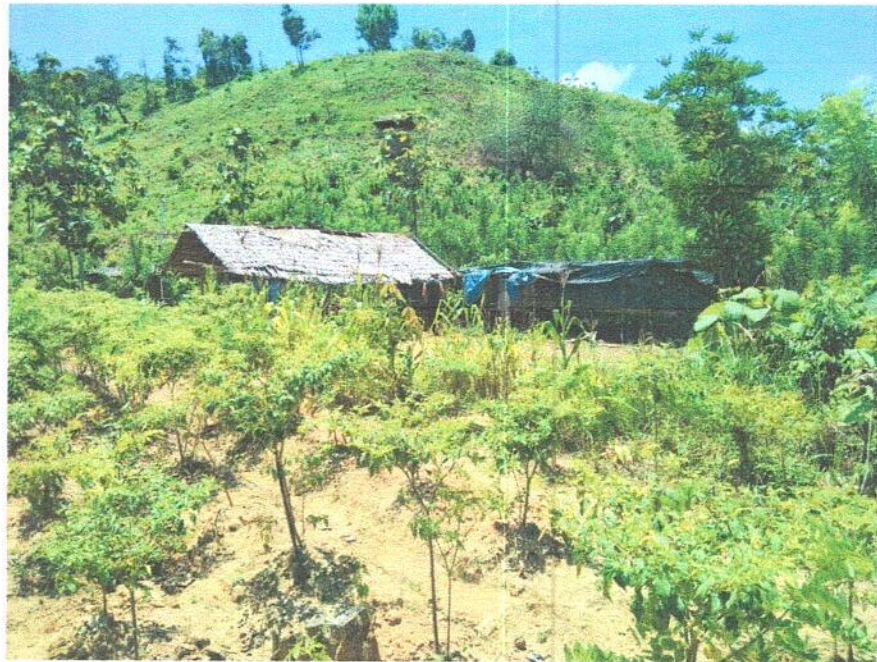
Gambar 4. Konsep pertanaman sayuran di lahan pekarangan rumah oleh warga transmigrasi di Desa Awua Jaya Kec. Asinua



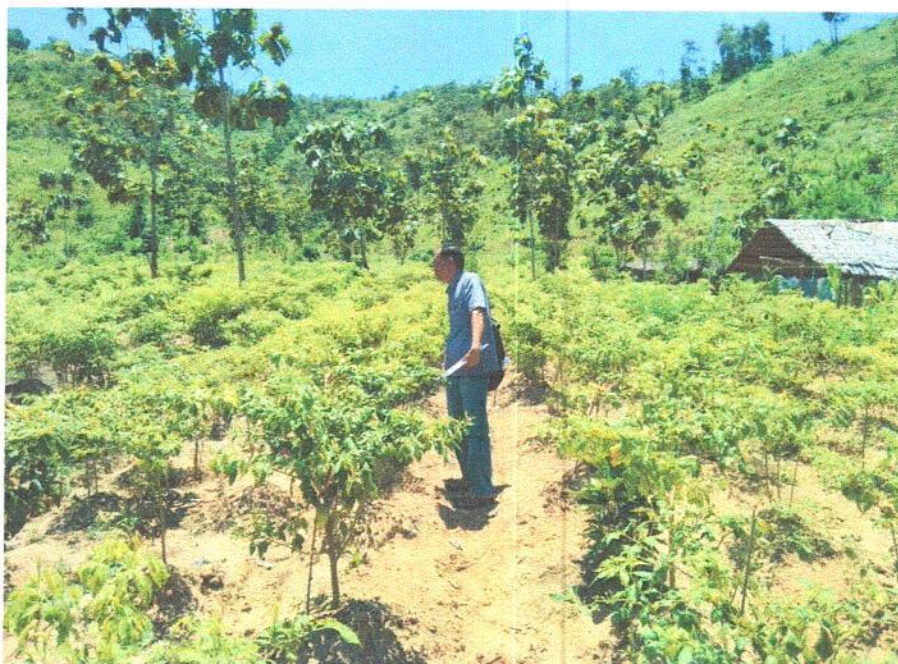
Gambar 5. Kondisi pertanaman sayuran oleh petani tanpa system budidaya yang baik



Gambar 6. Lahan pertanaman sayuran yang sudah tidak terolah dan terawatt dengan baik



Gambar 7. Lahan pertanaman cabai di desa Lasada Kec. Asinua tanpa pendampingan budidaya



Gambar 8. Kondisi pertanaman buah cabai yang terkena penyakit layu



Gambar 8. Usaha penyulingan minyak nilam (potensi nilai tambah)